

Berita	: Dana BOS Diduga Dikorupsi
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Tasikmalaya
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.8
Edisi	: Sabtu, 12 Mei 2018

Dana BOS Diduga Dikorupsi

Polres Kabupaten Tasikmalaya Tangkap Tangan Kepala Sekolah

SINGAPARNA, (PR).-

Polres Kabupaten Tasikmalaya mengungkap kasus dugaan korupsi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat sekolah dasar di ruang lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Salawu Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. UPTD Kecamatan Salawu diduga melakukan kegiatan fiktif menggunakan anggaran BOS tersebut.

Pengungkapan bermula atas operasi tangkap tangan yang dilakukan Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kabupaten Tasikmalaya terhadap AG (58), salah seorang kepala sekolah sekaligus Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Rabu (9/5/2018). AG diduga akan menyerahkan uang yang ia bawa sejumlah Rp 144.851.000 kepada seseorang di wilayah Kota Tasikmalaya.

Kepala Polreskab Tasikmalaya AKBP Anton Sudjarwo menuturkan, pengungkapan kasus bermula atas laporan masyarakat soal pungutan dana BOS SD negeri se-Kecamatan Salawu.

"Dari informasi itu, kami lakukan penyelidikan, ternyata betul. Pada 9 Mei kami dapat barang bukti yang diduga uang pemotongan dana BOS. Uang itu disimpan dalam tas sejumlah Rp.145.851.000, lalu kita bawa kembali ke kantornya," ucap Anton di Polres Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (11/5/2018).

Menurut Anton, sesampai di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Salawu, Polres Kabupaten Tasikmalaya menemukan tas berisi uang sejumlah Rp 659.401.000. Dengan demikian, total barang bukti dari operasi tangkap tangan tersebut senilai

kurang lebih Rp 800 juta.

"Setelah dikembangkan, ada beberapa dana yang sudah dipungut sekitar Rp 200 juta, jadi barbuk OTT kurang lebih senilai Rp 1 miliar lebih. Itu baru satu UPTD di Kecamatan Salawu, tidak menutup kemungkinan pungutan ini juga terjadi di UPTD lain," ucap Anton.

Terkait modus operandi dari korupsi dana BOS tersebut, Anton menyebutkan, ada dugaan pemalsuan kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana fiktif.

"Jadi sebenarnya ada kegiatan yang sudah dibiayai oleh pusat, tetapi

dimunculkan kembali dalam penganggaran oleh UPTD. Ada juga pembelian sarana prasarana seperti jam dinding," kata Anton.

Menurut Anton, pungutan yang terjadi di UPTD Kecamatan Salawu jelas tidak diatur dalam petunjuk teknis pengalokasian dana BOS seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018.

Meskipun pengungkapan bersifat operasi tangkap tangan, Polres Kabupaten Tasikmalaya belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Anton mengatakan, Polres Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan

penyidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut.

Sementara itu dihubungi terpisah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Edi Ruwandi mengakui Disdik Kabupaten Tasikmalaya sudah mendapatkan laporan atas OTT dugaan korupsi di UPTD Pendidikan Salawu.

Disdik Kabupaten Tasikmalaya mengaku terpukul karena kasus tersebut di luar dugaan. Atas kasus tersebut, Edi berharap kasus tersebut bisa menjadi bahan pelajaran bagi UPTD lain. **(Windyati Retno Sumardiyani)*****